



RENCANA KERJA (RENJA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BANTARKALONG
TAHUN 2025**

Alamat : Jln. Pemuda II Hegarwangi Telepon (0265) 580303 Faksimile (0265) 580303 e-mail : bantarkalong@tasikmalayakab.go.id Bantarkalong - 46187

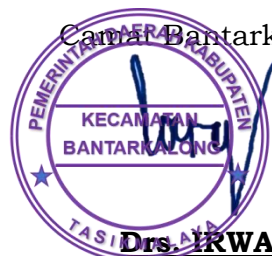
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Kerja Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan RENJA ini. Semoga dokumen RENJA ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Bantarkalong dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Bantarkalong, 14 Agustus 2024


Camat Bantarkalong

Drs. IRWAN
Pembina Tk. I
NIP. 19680520 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1
B. LANDASAN HUKUM 5
C. MAKSUD DAN TUJUAN 7
D. SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH 10
B. ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 33
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH 20
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 36
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIOANAL 47
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 48
C. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 52
BAB V PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANTARKALONG S/D TAHUN 2024
Tabel 2.1.2	REALISASI PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL / KELUARAN YANG DIRENCANAKAN
Tabel 2.3	REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023
Tabel 2.4	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
Tabel 2.5	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
Tabel 2.5.1	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Tabel 3.1	TUJUAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
Tabel 3.2	SASARAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
Tabel 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025, DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat

Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Bantarkalong, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bantarkalong merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Bantarkalong, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bantarkalong yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen

Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bantarkalong untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tasikmalaya dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025. Renja Kecamatan

Bantarkalong Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dan
24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Bantarkalong dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025 dapat tercapai;

2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantarkalong;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Bantarkalong dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kecamatan Bantarkalong;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025;
5. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Bantarkalong dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023,
Tahun Berjalan 2024 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan SKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANTARKALONG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023, Tahun Berjalan 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarkalong selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bantarkalong pada tahun 2023 dan tahun 2024 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 18 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN BANTARKALONG s/d TAHUN 2024 KABUPATEN TASIKMALAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					KECAMATAN BANTARKALONG									
7	01				KECAMATAN			-		-	-			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	65 (B)	59,35 (CC)	60 (CC)	64,65 (B)	0,00	61 (B)	N/A	0,00
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	N/A	12	N/A	0,00	12	N/A	0,00
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	0	7	0	0,00	7	0	0,00
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0	4	0	0,00	4	0	0,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	0	001	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	1	0	0,00	1	0	0,00
7	0	001	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	0	001	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	14	14	14	100,00	14	28	20,00
7	0	001	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100,00	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	0,00
7	0	001	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14	0	14	0	0,00	14	0	0,00
7	0	001	2.0	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	0	7	0	0,00	7	0	0,00
7	0	001	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	0	001	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	5	5	5	100,00	5	10	20,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	0	001	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	0	2	0	0,00	2	4	20,00
7	0	001	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	2	2	2	100,00	2	4	20,00
7	0	001	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	0	001	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33
7	0	001	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	0	001	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	4	0	0,00	4	0	0,00
7	0	001	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	0	001	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						yang Disediakan								
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	0	12	0	0,00	12	12	0,00
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	7	7	7	100,00	7	14	33,33
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	8	1	2	1	100,00	2	3	15,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	85,73	84,81	84,97	83,30	100,00	85,22	83,30	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	5	5	5	100,00	5	10	20,00
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	4	12	4	100,00	12	16	40,00
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	1	1	1	100,00	1	2	33,33
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36	6	6	6	100,00	6	12	33,33
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	36	6	6	6	100,00	6	12	33,33

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
7	0	00	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	1	1	1	1	100,00	1	2	100,00
7	0	002	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3	1	0	1	100,00	0	1	10,00
7	0	002	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	0	6	0	0,00	6	0	0,00
7	0	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	25	N/A	25	N/A	N/A	25	N/A	0,00
7	0	00	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	2	N/A	2	N/A	N/A	2	NA	0,00
7	0	003	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	0	2	0	0	2	2	0,00
7	0	00			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						yang ditindaklanjuti								
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	42	5	17	5	100,00	17	17	23,81
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	5	5	5	100,00	5	10	33,33
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	100,00	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	0,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	900	150	150	150	100,00	150	300	33,33

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300	0	300	0	0,00	300	0	0,00
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	01			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	01	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	0	8	0	0,00	8	0	0,00
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	0	8	0	0,00	8	0	0,00
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	8	8	8	100,00	8	16	33,33
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	0	1	0	0,00	1	0	0,00
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	48	8	8	8	100,00	8	16	33,33

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bantarkalong s/d Tahun 2024 adalah :

- 1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2

Realisasi program / kegiatan /Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)
1	2
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong, yaitu Tahun 2023 sebesar 83,30 poin dari target 84,97 poin dan Tahun 2024 sebesar 83,30 poin dari target 85,22 poin, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 85,73 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah :
- Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Bantarkalong;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
- b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :
- Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarkalong sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;

- Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Capaian target kinerja keuangan Tahun 2023 mencapai 91,41 % sebagaimana pada tabel 2.2. Sedangkan realisasi target kinerja keuangan Tahun berjalan 2024 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel. 2.3
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.862.234.431	1.702.338.171	91,41
7	1				KECAMATAN	1.862.234.431	1.702.338.171	91,41
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.644.129.431	1.484.979.646	90,00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.407.969.431	1.251.352.366	89,00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.407.969.431	1.251.352.366	89,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.185.500	81.945.500	100,00
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.973.000	47.973.000	100,00
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.096.500	7.096.500	100,00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.650.000	1.650.000	100,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.466.000	25.226.000	99,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.212.500	67.844.780	99,00
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.012.500	12.644.780	97,00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.200.000	55.200.000	100,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.762.000	83.837.000	98,00
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.732.000	65.807.000	97,00
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.030.000	18.030.000	100,00
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.460.000	49.460.000	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.370.000	14.370.000	100,00
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.370.000	14.370.000	100,00
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.090.000	20.090.000	100,00
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.090.000	20.090.000	100,00
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.700.000	89.953.525	99,00
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.700.000	89.953.525	99,00
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	90.700.000	89.953.525	99,00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.945.000	52.945.000	100,00
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.730.000	12.730.000	100,00
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40.215.000	40.215.000	100,00

Tabel. 2.3

**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Berjalan s/d Bulan Juni 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.382.522.964	1.223.499.004	51,35
7	1				KECAMATAN	2.382.522.964	1.223.499.004	51,35
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.977.282.964	1.027.117.404	51,95
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.576.964	859.053.304	51,98
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.652.576.964	859.053.304	51,98
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.787.000	25.958.900	28,28
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.496.000	13.994.100	26,66
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	5.500.000	2.124.800	38,63
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.025.000	1.100.000	36,36
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30.766.000	8.740.000	28,41
7	01	01	2.06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.789.000	61.265.000	99,15
7	01	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	53.789.000	53.280.000	99,05
7	01	01	2.06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.985.000	99,81

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.222.000	32.039.200	46,96
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.022.000	5.539.200	36,87
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.200.000	26.500.000	49,81
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.908.000	48.801.000	47,42
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaa dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa Dinas Jabatan	85.700.000	40.875.000	47,70
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung antor dan Bangunan Lainnya	17.208.000	7.926.000	46,06
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186.370.000	16.351.900	8,77
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	155.370.000	6.670.000	4,29
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	155.370.000	6.670.000	4,29
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	7.477.900	49,85
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	7.477.900	49,85
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.000.000	2.204.000	13,78
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	16.000.000	2.204.000	13,78
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	165.925.000	152.527.100	91,93
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	165.925.000	152.527.100	91,93
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	165.925.000	152.527.100	91,93
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	7.865.000	31,46
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	7.865.000	31,46

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	7.865.000	31,46
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.945.000	19.637.600	70,27
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.945.000	19.637.600	70,27
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.730.000	4.422.600	34,74
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	15.215.000	100,00

Berdasarkan Tabel 2.3. capaian target kinerja keuangan Kecamatan Bantarkalong Tahun berjalan sampai dengan Bulan Juni 2024 mencapai **51,35 %**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong			83,99	84,46	84,71	84,97	84,46	84,71	84,97	85,22	83,99	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	12,5	25	25	N/A	N/A	25	25	N/A	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong;

➤ Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Pelayanan publik di Kecamatan Bantarkalong tidak memadai dalam hal pendidikan, kesehatan atau infrastruktur, hal ini dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparatur di Desa dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam

menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

- c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparaturnya perangkat desa.

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :

- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
- b) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bantarkalong

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantarkalong dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bantarkalong dari 5 indikator terdapat

indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong tidak tercapai disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
- b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUA PPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong antara lain:

Sekretariat

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan,

Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Trantibum yaitu Pengelola Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bantarkalong;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Bantarkalong

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan

- kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Bantarkalong, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
 - c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Bantarkalong terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program, per kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel. 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantarkalong

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.363.514.866	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.203.423.326	
	KECAMATAN			-	2.363.514.866	KECAMATAN	-		-	2.203.423.326	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong</i>	63 (B) Poin	1.992.704.866	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong</i>	63 (B) Poin	1.929.183.326	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>	100 %	1.478.294.566	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>	100 %	1.693.102.326	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1.478.294.566	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1.693.102.326	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong</i>	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong</i>	100 %	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	14 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	14 Paket	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	7 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	7 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Cakupan pelayanan administrasi umum</i>	100 %	92.517.30	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Cakupan pelayanan administrasi umum</i>	100 %	72.791.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	53.563.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	41.412.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.550.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.025.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.404.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.854.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	150.153.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	63.821.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	86.332.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	184.970.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	68.170.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.970.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.970.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	86.770.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	95.120.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	70.020.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55.360.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	16.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	39.760.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	85,22 Poin	148.070.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	85,48 Poin	55.370.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	130.870.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	39.370.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	130.870.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	24.370.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	16.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6 Dokumen	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6 Dokumen	0	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	6 Urusan	17.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	6 Urusan	16.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	6 Laporan	17.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	6 Laporan	16.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peningkatan Status Desa	25 %	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peningkatan Status Desa	25 %	0	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	2 Dokumen	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	2 Dokumen	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdavaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdavaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	165.925.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	165.925.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	N/A Dokumen	165.925.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	N/A Dokumen	165.925.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5 Laporan	165.925.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5 Laporan	165.925.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong . Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong . Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	25.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan</i>	300 Orang	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan</i>	300 Orang	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nasional					Nasional			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	26.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	27.945.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	26.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	27.945.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	0	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa		8 Dokumen		

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	13.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	12.730.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	17.315.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	15.215.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bantarkalong. Namun dalam proses ini Kecamatan Bantarkalong mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bantarkalong terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahaan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Usulan Program atau Kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.

Pada Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025
dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I H	I L		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tujuan dari tema ini adalah untuk: Menciptakan lapangan kerja berkualitas, Menurunkan ketimpangan, Menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung pertumbuhan yang merata antardaerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menargetkan:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen
- Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen
- Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen

RKP 2025 juga memiliki tiga arah kebijakan prioritas pembangunan, yaitu: SDM berkualitas, Infrastruktur berkualitas, Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

RKP 2025 dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun RKPD. Selain itu, RKP juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha (BUMN/swasta) dan non-state actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki pedoman 3 Arah Kebijakan, yaitu: 1) SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2) Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan Infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; 3) ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan

program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bantarkalong dalam jangka waktu Satu tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bantarkalong merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Bantarkalong melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya. Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarkalong pada Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Bantarkalong	61 (B)

Tabel 3.2.
Sasaran Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Bantarkalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	61 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Bantarkalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	85,22
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase peningkatan Status Desa	25
4.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100
5.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100
6.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Bantarkalong di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun Anggaran 2025

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang

berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bantarkalong. Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 2.203.423.326,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Memperhatikan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan target pembangunan berkelanjutan (TPB)
5. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana Kerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu

program dan kegiatan. Dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel. 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025,
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya,

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.363.514.866			-	2.376.317.866
	KECAMATAN			-	2.363.514.866			-	2.376.317.866
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong		63 (B)	1.992.704.866	DAU		63 (B)	1.959.322.866
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Dokumen	0	DAU		15	12 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	0	DAU		7 Dokumen	30.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0	DAU		4 Laporan	10.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>		100 %	1.478.294.566	DAU		100 %	1.501.241.466
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	1.478.294.566	DAU		14 Orang/bulan	1.501.241.466

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong		100 %	0	DAU		100 %	15.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	14 Paket	0	DAU		14 Paket	8.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Orang	0	DAU		7 Orang	6.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum		100 %	92.517.300	DAU		100 %	81.196.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	5 Paket	53.563.300	DAU		5 Paket	30.917.300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya,	2 Paket	0	DAU		2 Paket	8.679.100

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bantarkalong, Semua Kel/Desa						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.550.000	DAU		1 Paket	8.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.000.000	DAU		3 Dokumen	4.500.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0	DAU		12 Laporan	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong,	12 Laporan	28.404.000	DAU		12 Laporan	28.600.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100 %	150.153.000	DAU		100 %	138.665.000
	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Unit	63.821.000	DAU		7 Unit	65.705.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Unit	86.332.000	DAU		4 Unit	72.960.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	184.970.000	DAU		100 %	105.470.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong,	12 Laporan	14.970.000	DAU		12 Laporan	15.470.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmala ya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	170.000.000	DAU		12 Laporan	90.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Tasikmala ya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	100 %	86.770.000	DAU		100 %	87.750.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Tasikmala ya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Unit	70.020.000	DAU		7 Unit	70.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Tasikmala ya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	16.750.000	DAU		1 Unit	17.250.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		84,48 Poin 85,48 Poin 5 Dokumen	148.070.000	DAU		85,48Poin 84,48Poin 85,48Poin Poin	149.570.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		5 Dokumen	130.870.000	DAU		5 Dokumen	131.870.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Laporan	114.370.000	DAU		4 Laporan	114.870.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.500.000	DAU		1 Dokumen	17.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		6 Dokumen	0	DAU		6 Dokumen	0
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	0	DAU		6 Laporan	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat</i>		6 Urusan	17.200.000	DAU		6 Urusan	17.700.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain</i>	Kab. Tasikmalaya,	6 Laporan	17.200.000	DAU		6 Laporan	17.700.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dilimpahkan	<i>yang Dilimpahkan</i>	Bantarkalong, Semua Kel/Desa						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase peningkatan Status Desa</i>		25 %	0	DAU		25 %	11.500.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>		2 Dokumen	0	DAU		2 Dokumen	11.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	2 Laporan	0	DAU		2 Laporan	11.500.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang</i>		0 % N/A %	165.925.000	DAU		0 %	70.200.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>ditindaklanjuti</i>							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>		N/A Dokumen	165.925.000	DAU		N/A Dokumen	170.925.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	5 Laporan	165.925.000	DAU		5 Laporan	170.925.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100 %	26.500.000	DAU		100 %	27.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100 %	26.500.000	DAU		100 %	27.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	200 Orang	26.500.000	DAU		200 Orang	27.000.000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	300 Orang	0	DAU		300 Orang	0

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Lokal, Regional, dan Nasional</i>							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</i>		100 %	30.315.000	DAU		100 %	58.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</i>		100 %	30.315.000	DAU		100 %	58.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	0	DAU		8 Dokumen	8.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong,	8 Dokumen	0	DAU		8 Dokumen	20.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Kab. Tasikmala ya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	13.000.000	DAU		8 Dokumen	13.500.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Kab. Tasikmala ya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0	DAU		1 Dokumen	0
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	Kab. Tasikmala ya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	17.315.000	DAU		8 Dokumen	16.500.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bantarkalong untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarkalong.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Bantarkalong.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025. Kecamatan Bantarkalong sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bantarkalong dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bantarkalong. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Bantarkalong.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen

stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bantarkalong ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bantarkalong, 12 Agustus 2024
Camat Bantarkalong



Drs. IRWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19680520 199903 1 003

2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**KECAMATAN BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jln. Pemuda II Hegarwangi
(0265) 580303
bantarkalong@tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun. Renja perubahan ini memuat tentang Rencana Kinerja yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2025 perubahan yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Renja Perubahan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target capaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 23 Juli 2025
CAMAT BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. IRWAN

NIP. 19680520 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum.....5

1.3. Maksud dan Tujuan8

1.4. Sistematika Penulisan8

**BAB 2 EVALUASI RENJA KECAMATAN
BANTARKALONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025..... 11**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan
Bantarkalong Sampai Dengan Triwulan I dan
Capaian Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun
2024 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan
Bantarkalong.....25

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kecamatan Bantarkalong.....27

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perubahan Tahun 2025.....30

**BAB 3 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN 43**

BAB 4 PENUTUP..... 53

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

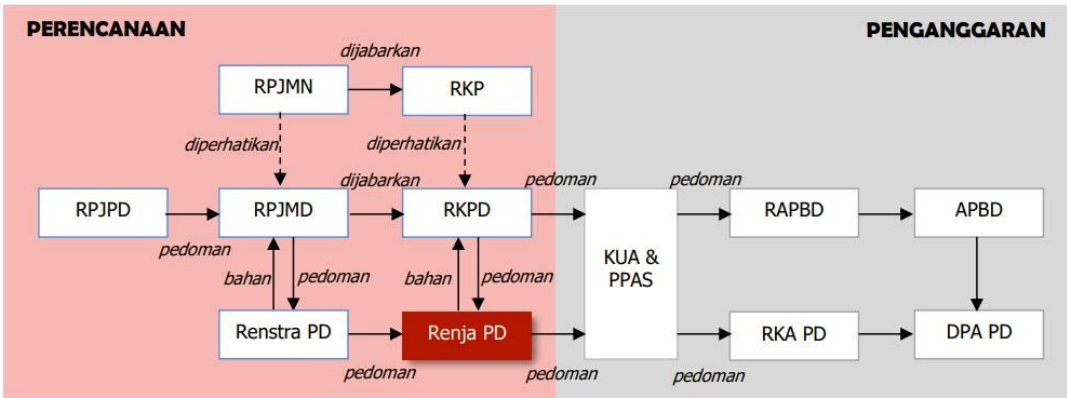
1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah berupa dokumen rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek berupa dokumen rencana kerja (Renja). Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya disebutkan bahwa Renstra dirumuskan kedalam rancangan Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang

dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Bantarkalong, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bantarkalong merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Bantarkalong.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025, merupakan Rancangan Perubahan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yaitu :

“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Penurunan Angka Prevalansi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;

7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa;

Dengan demikian maka program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarkalong menunjang program prioritas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24); dan
 20. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

BANTARKALONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN BANTARKALONG

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA

KECAMATAN BANTARKALONG

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

TAHUN 2025

Evaluasi merupakan suatu proses pemantauan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2024

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

2.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarkalong

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025

BAB 2

EVALUASI RENJA KECAMATAN BANTARKALONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Sampai Dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarkalong Tahun 2024

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, serta disajikan capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian target Renstra 2021 – 2026 sampai dengan Tahun 2025 triwulan I:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	63	1.918.339.140	66,7	1.871.871.006	63	1.929.183.326	66,7	400.260.006							66,7	401.634.806	105,87	20,82	133,4	2.273.505.812	211,75	118,51	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengang garan, dan Evaluasi Kiner ja Perangkat Daerah	Dokumen	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dokumen	7	10.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0				0		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sangat Rendah				Sangat Rendah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang sesuai aturan	Persen	100	1.491.075.791	100	1.547.419.116	11	1.693.102.326	71,43	358.194.283							71,43	358.194.283	649,36	21,16	171,43	1.905.613.399	171,43	127,80	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14	1.491.075.791	44	1.547.419.116	11	1.693.102.326	10	358.194.283							10	358.194.283	90,91	21,16	54	1.905.613.399	385,71	127,80	Sekretaris Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		90,91				385,17			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	14.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepelengkapannya	Paket	14	8.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	6.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0				0			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sangat Rendah				Sangat Rendah			

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100	59.636.400	400	96.458.000	100	66.089.000	96,77	8.747.703							96,77	8.747.703	96,77	13,24	496,77	105.205.703	496,77	176,41	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	30.147.300	5	53.042.000	5	41.412.000	5	5.397.703							5	5.397.703	100,00	13,03	10	58.439.703	200,00	193,85	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	0	0	4	5.500.000	0	5.450.000	1	650.000							1	650.000	0,00	11,93	5	6.150.000	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah persediaan peralatan rumah tangga	Paket	2	8.179.100	0	0	0	0	0	0							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.000.000	12	3.025.000	12	3.025.000	12	750.000							12	750.000	100,00	24,79	24	3.775.000	200,00	94,38	Sekretaris Kecamatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0		0	0							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Sekretaris Kecamatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	17.040.000	12	34.891.000	12	16.202.000	12	1.950.000							12	1.950.000	100,00	12,04	24	36.841.000	200,00	216,20	Sekretaris Kecamatan
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			30,15				92,04		
Predikat Kinerja Kegiatan																			Rendah				Rendah		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	138.065.000	100	61.265.000	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	65.205.000	7	53.280.000	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	72.860.000	4	7.985.000	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0				0			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sangat Rendah				Sangat Rendah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	104.970.000	100	66.643.690	100	68.170.000	100	17.127.020							100	17.127.020	100,00	25,12	200	83.770.710	200,00	79,80	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.970.000	12	13.443.690	12	14.970.000	12	2.827.020							12	2.827.020	100,00	18,88	24	16.270.710	200,00	108,69	Sekretaris Kecamatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	12	53.200.000	12	53.200.000	12	14.300.000							12	14.300.000	100,00	26,88	24	67.500.000	200,00	75,00	Kasi Trantibum
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		61,44				145,92			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sedang				Sedang			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang	Persen	100	80.591.949	100	100.085.200	100	95.120.000	100	16.191.000							100	16.191.000	100,00	17,02	200	116.276.200	200,00	144,28	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	63.841.949	7	82.877.200	7	55.360.000	71	12.945.000							71	12.945.000	1014,29	23,38	78	95.822.200	1114,29	150,09	Sekretaris Kecamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	16.750.000	1	17.208.000	1	39.760.000	1	3.246.000							1	3.246.000	100,00	8,16	2	20.454.000	200,00	122,11	Sekretaris Kecamatan
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		15,77				136,10			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Rendah				Rendah			

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	Point	100	11.000.000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan	Dokumen	2	11.000.000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	11.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi PMDe
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			0			0			
Predikat Kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah			Sangat Rendah			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	Point	85,48	49.900.000	83,30	186.210.000	83,30	45.630.000	0	0							0	0	0,00	0,00	83,3	186.210.000	97,45	373,17	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen	38.000.000	5	155.210.000	5	33.730.000	0	0							0	0	0,00	0,00	5	155.210.000	0,00	408,45	Kasi Kesos
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	4	Laporan	21.500.000	4	155.210.000	4	23.230.000	0	0							0	0	0,00	0,00	4	155.210.000	0,00	721,91	Kasi Kesos

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																								
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Doku men	16.500.000	0	0	1	10.500.000	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi PMDe
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6	Doku men	0	6	15.000.000	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	Lapor an	0	6	15.000.000	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pemerintahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	6	Urusa n	11.000.000	6	16.000.000	6	11.900.000	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi PMDe
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6	Doku men	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi PMDe

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																									
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	6	11.900.000	6	16.000.000	6	11.900.000	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
																		0				0			
																		Sangat Rendah				Sangat Rendah			
program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	165.925.000	%	164.629.100	%	165.925.000	%	130.115.900							%	130.115.900	0,00	78,42	100	294.745.000	100,00	177,64	Kasi Trantibum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	100	165.925.000	100		%	165.925.000	%	130.115.900							%	130.115.900	0,00	78,42	100	130.115.900	100,00	78,42	Kasi Trantibum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kasi Trantibum

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	165.925.000	5	164.629.100	5	165.925.000	5	130.115.900							5	130.115.900	100,00	78,42	10	294.745.000	200,00	177,64	Kasi Kesos
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		52,28				85,35			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sedang				Sedang			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	103.500.000	100	25.000.000	100	25.000.000	0	0							0	0	0,00	0,00	100	25.000.000	100,00	24,15	Kasi Kesos
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	103.500.000	100	25.000.000	100	25.000.000	0	0							0	0	0,00	0,00	100	25.000.000	100,00	24,15	Kasi Kesos
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Orang	150	26.500.000	150	25.000.000	150	25.000.000	0	0							0	0	0,00	0,00	150	25.000.000	100,00	94,34	Kasi Kesos

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																								
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	300	77.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kasi Kesos
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0				39,50			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Sangat Rendah				Sangat Rendah			
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	49.500.000	100	27.945.000	100	24.745.000	100	15.215.000							100	15.215.000	0,00	0,00	200	43.160.000	200,00	87,19	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	49.500.000	100	27.945.000	100	24.745.000	100	15.215.000							100	15.215.000	0,00	0,00	200	43.160.000	200,00	87,19	Kasi Pemerintahan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8	8.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	8	20.000.000	0	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	8	11.000.000	8	12.730.000	8	9.530.000									0	0	0,00	0,00	8	12.730.000	100,00	115,73	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	8	0	0	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	8	10.500.000	8	15.215.000	8	15.215.000									8	15.215.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kasi PMde
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)																			16,67				67,59		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target Renstrs Perangkat Daerah Tahun 2025 (Kumulatif 2021 – 2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV										
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Predikat Kinerja Kegiatan																		Rendah				Sedang			

Tahun 2024 Kecamatan Bantarkalong melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, 18 (delapan belas) sub kegiatan, dengan besaran anggaran sebesar Rp. 2.382.522.964,- bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.270.928.206 atau 95,32%,-.

Tahun 2025 Kecamatan Bantarkalong melaksanakan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, 16 (enam belas) sub kegiatan dengan total anggaran berdasarkan pagu sebesar Rp. 2.183.781.326,-. Realisasi anggaran Kecamatan Bantarkalong sampai dengan triwulan I mencapai 24,98 % atau sebesar Rp. 545.590.906,-.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran belum dilaksanakan, diantaranya :

1. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, hal ini dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II sesuai dengan rencana anggaran kas.
2. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, hal ini dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II sesuai dengan rencana anggaran kas.
3. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, hal ini dikarenakan pelaksanaan sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II sesuai dengan rencana anggaran kas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

Kecamatan Bantarkalong sebagai salah satu unit kerja pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan daerah, kecamatan bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai layanan administrasi dan sosial yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga, seperti pelayanan kependudukan, perizinan, dan pelayanan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan selama periode tahun berjalan, terlihat adanya beberapa capaian positif maupun tantangan yang masih perlu dibenahi. Kinerja pelayanan Kecamatan Bantarkalong diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu kecepatan layanan, kepuasan masyarakat, keterbukaan informasi, serta kompetensi aparatur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

- j. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan kecamatan, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada indikator – indikator yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU / SPM / IKK / SDG's)	Satuan	Target		Realisasi dan Proyeksi Realisasi		Analisis Capaian
			2024	2025	2024	2025	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	%	61	63	64,65	66,7	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	poin	85,22	85,48	83,30	83,30	
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarkalong

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong tidak terlepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu – isu yang berasal dari permasalahan eksternal. Dari hasil analisis pelayanan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Bantarkalong masih dalam alur yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Walaupun masih terdapat indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarkalong adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bantarkalong terkait dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bantarkalong dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong tidak tercapai disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUA PPAS, sehingga tidak ada

kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong antara lain:

Sekretariat

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan; Seksi Pemerintahan
- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Trantibum yaitu Pengelola Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bantarkalong;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Bantarkalong

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.

- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Bantarkalong, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan,

- pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perubahan Tahun 2025**

Rancangan awal RKPD Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perubahan Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan Renja Perubahan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Terkait dengan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.203.423.326,00	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.203.781.326,00
	KECAMATAN			-	2.203.423.326,00	KECAMATAN	-		-	2.203.781.326,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	63 (B) Poin	1.929.183.326,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	63 (B) Poin	1.922.481.326,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	0

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>	100 %	1.693.102.326,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>	100 %	1.693.102.326,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1.693.102.326,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1.693.102.326,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong</i>	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong</i>	100 %	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	14 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	14 Paket	0

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	72.791.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %	72.791.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	41.412.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	41.412.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.450.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.025.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.025.000

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.854.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.202.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	0
	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	68.170.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	68.170.000,00

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.970.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.970.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	95.120.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	95.120.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55.360.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55.360.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	39.760.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	39.760.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	85,22 Poin	55.370.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	85,48 Poin	65.630.000,00

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>					<i>Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	39.370.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	39.370.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	24.370.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	23.230.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	15.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	10.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6 Dokumen	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6 Dokumen	0
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	6 Urusan	16.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	6 Urusan	16.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	16.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	31.900.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peningkatan Status Desa	25 %	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase peningkatan Status Desa	25 %	0

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	2 Dokumen	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	2 Dokumen	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>	N/A %	165.925.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>	0 %	165.925.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	N/A Dokumen	165.925.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	N/A Dokumen	165.925.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5 Laporan	165.925.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5 Laporan	165.925.000

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	25.000.000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan</i>	300 Orang	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan</i>	300 Orang	0

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	27.945.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	24.745.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	27.945.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	27.945.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	0

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	12.730.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	9.530.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	15.215.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	15.215.000,00

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan merupakan perubahan rumusan program dan kegiatan berdasarkan berbagai pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

BAB 3
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 161 terkait perubahan anggaran, bahwa perubahan anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan atau antar rincian obyek belanja.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan berlandaskan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2025 Triwulan I dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarkalong pada tahun berjalan.

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan Anggaran Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program Perubahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)																	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025																					
1					2					3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
					Kecamatan Bantarkalong																											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																											
7					KECAMATAN																											
7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan bantarkalong Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan		63 (B) 63 (B) 63 (B) Point Point Poin Point	63 (B) 63 (B) 63 (B) Point Poin Point	1.929.183.326,00	1.922.481.326,00					2.144.473.766,40																
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00		-			0,00	Kecamatan Bantarkalong															
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			0,00	Kecamatan Bantarkalong															
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			0,00	Kecamatan Bantarkalong															
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																											
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana	-			0,00	Kecamatan Bantarkalong															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Alokasi Umum				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan		100 %	100 %	1.693.102.326,00	1.693.102.326,00		-		1.501.241.466,40	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.693.102.326,00	1.693.102.326,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		1.501.241.466,40	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong		100 %	100 %	0,00	0,00		-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	11 Paket	11 Paket	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum		100 %	100 %	72.791.000,00	72.791.000,00		-		72.517.300,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	41.412.000,00	41.412.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		30.917.300,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	-	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	5.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		8.500.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.025.000,00	3.025.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		4.500.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	22.854.000,00	16.202.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		28.600.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100 %	100 %	0,00	0,00		-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	68.170.000,00	68.170.000,00		-		105.470.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	14.970.000,00	14.970.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		15.470.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	53.200.000,00	53.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		90.000.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	95.120.000,00	95.120.000,00		-		87.750.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Unit	7 Unit	55.360.000,00	55.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		70.500.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	39.760.000,00	39.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		17.250.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong		84,48 85,48 Poin Poin	85,48 84,48 Poin Poin	55.370.000,00	65.630.000,00				149.570.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5 Dokumen	5 Dokumen	39.370.000,00	39.370.000,00		-		131.870.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	24.370.000,00	23.230.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		114.870.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		17.000.000,00	Kecamatan Bantarkalong

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat		6 Urusan	6 Urusan	16.000.000,00	16.000.000,00		-		17.700.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	16.000.000,00	31.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		17.700.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa		25 %	25 %	0,00	0,00				0,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00		-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		0 N/A % %	N/A 0 % %	165.925.000,00	165.925.000,00				170.925.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		N/A Dokumen	N/A Dokumen	165.925.000,00	165.925.000,00		-		170.925.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	165.925.000,00	165.925.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		170.925.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		-	-	25.000.000,00	25.000.000,00				27.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00		-		27.000.000,00	Kecamatan Bantarkalong

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	150 Orang	150 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		27.000.000,00	Kecamatan Bantarkalong	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100 %	100 %	27.945.000,00	24.745.000,00			30.000.000,00		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan		100 %	100 %	27.945.000,00	27.945.000,00		-		30.000.000,00	Kecamatan Bantarkalong
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	Kecamatan Bantarkalong	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	12.730.000,00	9.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		13.500.000,00	Kecamatan Bantarkalong	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	15.215.000,00	15.215.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		16.500.000,00	Kecamatan Bantarkalong
J U M L A H										2.203.423.326,00	2.203.781.326,00				2.144.473.766,40	

BAB IV

PENUTUP

Pada penutup perlu disajikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan sumber daya kegiatan, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut perbaikan pencapaian target kinerja.

BAB 4

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Rencana Kerja Perubahan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan dan APBD perubahan Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Capaian Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
2. Memperhatikan tujuan dan sasaran yang dikehendaki;
3. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
4. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga konsistensi pembangunan.

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau disisi lain dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Tasikmalaya, 23 Juli 2025

CAMAT BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. IRWAN

NIP. 19680520 199903 1 003